

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto sering dijumpai menggunakan hak tersebut demi menjaga dan melancarkan kepentingan nasional negaranya. Akibatnya, Dewan Keamanan sering mengalami hambatan dalam memutuskan tindakan berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Kasus Israel – Palestina terus berkejolak hingga hari ini, dikarenakan veto Amerika Serikat yang selalu digunakan untuk melindungi Israel. Kejolak konflik di Suriah tak kunjung terselesaikan karena Rusia yang aktif menggunakan hak vetonya berkenaan dengan permasalahan tersebut demi melindungi Suriah. Fakta-fakta tersebut telah cukup menjadi bukti untuk menyatakan bahwa veto tidak memberi pengaruh positif bagi Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tetapi membuat peran Dewan Keamanan menjadi tidak efektif dan efisien sebagaimana tujuan pembentukannya.
2. Langkah dan tindakan solutif dalam menyikapi hal tersebut demi masa depan Dewan Keamanan yang lebih baik adalah pembatasan hak veto melalui pengaturan khusus (*lex specialis*). Tindakan tersebut akan menjadi *eligible option* yang dapat menampung segala keinginan dan kehendak mayoritas yang lahir dari entitas masyarakat internasional seutuhnya demi usia panjang sebuah kehidupan yang damai.

5.2 Saran

Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera membentuk *lex specialis* yang akan menjadi pedoman dan mekanisme penggunaan hak veto. Substansi dari *lex specialis* tersebut kurang lebih garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap kejahatan kemanusiaan, hak veto dilarang untuk digunakan.
2. Terhadap permasalahan yang sama, masing-masing pemegang hak veto hanya dapat menggunakan haknya sebanyak 3 kali dalam hitungan waktu yang sama dengan masa kerja anggota tidak tetap (2 tahun).
3. Terhadap permasalahan yang sama, jika resolusi tidak berhasil dilahirkan karena dikenakan veto dalam 5 kali pembahasan secara berturut-turut, maka Dewan Keamanan dianggap gagal dan kepada Majelis Umum diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damos Dumoli Agusman. 2017. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Garner. 2004. *Black's-Law-Dictionary*. Edisi 8.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- John H Kagel. Hankyoung Sung dan Eyal Winter. 2010. *Veto Power in Committees: an Experimental Study*. ttp.
- Mikiso Hane. 1992. *Modern Jepang a Histirical Survey*. United States of America. Westview Press Inc.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana.
- Satjipto Raharjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Sefriani. 2017. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. UI-Press.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Penertbit Alfabeta.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. UI-Press.
- UNIC. 1996. *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Jakarta. Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jurnal

Ahmad dan Novendri M. Nggilu. 2019. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*". *Jurnal Konstitusi*. Volume 16 Nomor 4.

Courtney J. Fung. 2018. "Separating Intervention from Regime Change: China's Diplomatic Innovations at the UN Security Council Regarding the Syria Crisis". *The China Quarterly*.

Dag Hammarskjold Library. *Security Council – Veto List (in reverse chronological order)*.

Jabinson Purba. dan Boy Anugerah. 2019. "Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. Edisi 37.

Lisnawaty Badu. 2010. "Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional". *Jurnal Legalitas*. Volume 3 Nomor 2.

Lusiana M. Tijow. dkk. 2017. "The Binding Authority Of Human Right Law As Guarantee Of Legal Protection Toward The Body Integrity Of Woman As The Victim Of Not-Fulfilled Promise To Marry". *Academic Research International*. Volume 8 Nomor 1.

Madeleine O. Hosli. dkk. 2011. "Squaring the circle? Collective and distributive effects of United Nations Security Council reform". *Review of International Organizations*. Volume 6.

Marthinus Omba. 2008. "Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 5. Nomor 4.

Matthew D. Stephen. 2018. "Legitimacy Deficits of International Organizations: design, drift, and decoupling at the UN Security Council". *Cambridge Review of International Affairs*. Volume 31 Nomor 1.

Turiman. 2010. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo \ Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)".

Regulasi

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Provisional Rules of Procedure of the Security Council

Security Council Draft Resolution Number S/1995/394

Security Council Draft Resolution Number S/PV.23

Internet

1941: *The Atlantic Charter*, <http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html>.

Current Members, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>.

Joint G4 Statement by Brazil, Germany, India and Japan, Delivered by H.E. Ambassador Yasuhisa Kawamura, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Informal Meeting of the General Assembly, Second Intergovernmental Meeting on Security Council Reform, https://www.un.emb-japan.go.jp/itpr_en/kawamura022519.html.

Nibras Nada Nailufar, *Hak Veto PBB: Definisi, Sejarah dan Perdebatannya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/213000169/hak-veto-pbb-definisi-sejarah-dan-perdebatannya?page=all>.

Preamble, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/preamble/index.html>.

Stewart M. Patrick, *Limiting the Security Council Veto in the Face of Mass Atrocities*, <https://www.cfr.org/blog/limiting-security-council-veto-face-mass-atrocities>.

Veto, https://en.wikipedia.org/wiki/Veto#cite_note-Spitzer-2.

Veto, <https://www.history.com/topics/us-government/veto>. original published by A&E Television Network.

CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama : Farisandy Rusman Baeda
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tolondadu / 11 April 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolondadu II, Kec.
Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan
No. Hp : 0813 5588 6910
Email : fandybaeda@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar Negeri II Tolondadu (2001 – 2004)
Sekolah Dasar Negeri Kaidipang (2004 – 2005)
Sekolah Dasar Negeri Sondana (2005 – 2007)
Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bolaang Uki (2007 – 2008)
Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Kotamobagu (2008 – 2010)
Sekolah Menengah Kejuruan Cokroaminoto Kotamobagu (2010 – 2011)
Sekolah Menengah Atas Negeri I Bolaang Uki (2011 – 2013)

Pendidikan Nonformal

Siswa Jurusan *Vocabulary Future* Akademi Manado (Manado, 2013)

Peserta Debat Airlangga Law Competition (Surabaya, Januari 2016)

Peserta Seminar Nasional “Refleksi Hardiknas, Pemenuhan Hak Konstitusional
Warga Negara di Bidang Pendidikan: Selebrasi atau Solusi” (Makassar, Mei
2016)

Peserta Debat Gebyar Konstitusi Universitas Hasanuddin (Makassar, Mei 2016)

Peserta Seminar Nasional “Konstitusi Anti Korupsi: Cita Pemberantasan Korupsi
Dalam UUD NRI Tahun 1945” (Jakarta, Juli 2017)

Peserta Debat Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Regional Timur (Jember, Juli
2017)

VIII Besar Debat Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Regional Timur (Malang, April
2018)

Peserta Debat Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Nasional (Bogor, Mei 2018)

Riwayat Organisasi

Sekretaris Jenderal International Law Corner Universitas Negeri Gorontalo 2015

Presiden International Law Corner Universitas Negeri Gorontalo 2016 - 2017

Anggota Departemen Riset dan IT Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Negeri Gorontalo 2015

Ketua Departemen Keilmuan dan Kajian Strategis Senat Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016

Panitia “Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan: Penataan Sistem Ketatanegaraan, Tata Cara Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN”
2016

Tim Kerja Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo
2018

Divisi Acara Pelaksanaan Masa Orientasi Mahasiswa Baru 2018

Sekretaris Panitia Kegiatan Giving and Teaching 2018